



Implementasi Eliminasi TBC dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

Titi Stiawati¹ Ima Maisaroh² Muhammad Januar Ifdal Dikri³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
titi.stiawati@untirta.ac.id ima.maisaroh@untirta.ac.id 6661210081@untirta.ac.id

Received : Mei 29, 2025; Accepted : Oct 30, 2025

DOI 10.25299/jiap.2025.22704

Abstract

This study discusses the implementation of the Tuberculosis (TB) Elimination policy in creating a healthy environment in Cibeber District, Lebak Regency, which has the highest number of TB cases compared to other districts. The high incidence rate is driven by low public education, strong social stigma, and concerning socio-economic conditions. The research used a qualitative method with a case study approach. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. Data was collected through in-depth interviews with health workers, village officials, and community members, direct observation, and documentation studies of activity reports and epidemiological data. Specifically, this research was analyzed using Donald Van Meter and Carl Van Horn's Public Policy Implementation Theory, focusing on six variables: (1) Policy Standards and Objectives, (2) Resources, (3) Characteristics of Implementing Agencies, (4) Dispositions of Implementors, (5) Inter-Organizational Communication, and (6) External Environment (economic, social, political). The results show that the implementation of the TB elimination program has not been optimal. Based on the theoretical framework, the findings reveal main obstacles in the Resources variable (limitations in human resources, facilities and infrastructure, and uneven drug distribution), the Dispositions of Implementors variable (less than optimal), and the External Environment variable in the form of socio-economic conditions and low public awareness. Although Inter-Organizational Communication ran quite well, unstable social and economic factors remained the main obstacles to creating a healthy and TB-free environment in Cibeber District.

Key Words : Policy, Elimination, Tuberculosis

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) dalam mewujudkan lingkungan sehat di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, yang mencatat kasus TBC tertinggi. Tingginya angka kejadian ini didorong oleh rendahnya edukasi, kuatnya stigma sosial, dan kondisi sosial-ekonomi yang memprihatinkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petugas kesehatan, aparat desa, dan masyarakat, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Secara khusus, penelitian ini dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn dengan fokus pada enam variabel: (1) Sasaran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap atau Kecenderungan Pelaksana, (5) Komunikasi antar Organisasi, dan (6) Lingkungan Eksternal (ekonomi, sosial, politik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program eliminasi TBC belum optimal. Berdasarkan kerangka teori, temuan mengungkap kendala utama pada variabel Sumber Daya (keterbatasan SDM, sarana-prasarana, dan distribusi obat yang tidak merata), Sikap Pelaksana (kurang optimal), serta Lingkungan Eksternal berupa kondisi sosial-ekonomi dan kesadaran masyarakat yang rendah. Meskipun Komunikasi antar Organisasi berjalan cukup baik, faktor sosial dan ekonomi yang tidak stabil tetap menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas TBC di Kecamatan Cibeber.

Key Words : Kebijakan, Eliminasi, Tuberkulosis

Pendahuluan

Kesehatan lingkungan merupakan kondisi optimal dari lingkungan fisik, biologis, dan sosial yang mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat tidak hanya menciptakan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu determinan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan lingkungan mencakup serangkaian upaya yang ditujukan untuk menyehatkan berbagai elemen lingkungan, seperti air, udara, serta pengelolaan limbah padat, cair, dan gas. Selain itu, pengendalian terhadap faktor-faktor penyebab penyakit seperti radiasi, kebisingan, dan pencemaran lingkungan juga termasuk dalam lingkup kesehatan lingkungan.

Salah satu aspek penting dari kesehatan lingkungan adalah pencegahan terhadap penyakit menular yang seringkali bersumber dari kondisi lingkungan yang tidak sehat. Berbagai penyakit infeksi, termasuk tuberkulosis (TBC), terbukti memiliki hubungan erat dengan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. Lingkungan yang tidak memenuhi standar kesehatan, seperti rumah dengan kelembaban tinggi, ventilasi buruk, dan paparan polutan seperti asap rokok atau emisi kendaraan, dapat menjadi media yang ideal bagi penyebaran *Mycobacterium tuberculosis*, bakteri penyebab utama TBC.

Melalui *Political Declarations on the Fight Against Tuberculosis* yang diluncurkan pada Sidang Umum PBB pada 26 September 2018, Indonesia dan komunitas global berkomitmen untuk mentransformasi respons terhadap tuberkulosis (TBC). Pencegahan dan

pengendalian tuberkulosis (TBC) memerlukan perhatian pada faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi epidemi ini, dengan komitmen politik yang tinggi dan partisipasi kuat dari masyarakat (Stop TBC Partnership, 2022).

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang umumnya menyerang paru-paru dan disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau meludah. Tuberkulosis dapat dicegah dan diobati. Sekitar seperempat populasi dunia diperkirakan telah terinfeksi bakteri tuberkulosis, dan sekitar 5-10% dari mereka yang terinfeksi akan mengalami gejala dan berkembang menjadi penyakit tuberkulosis. Indonesia merupakan negara dengan beban tuberkulosis tertinggi kedua di dunia setelah India, dengan lebih dari 10 juta kasus baru setiap tahun. Saat ini, Indonesia mencatat 1.060.000 kasus tuberkulosis dan 134.000 kematian terkait tuberkulosis, dengan sekitar 17 orang yang meninggal akibat tuberkulosis setiap jamnya (World Health Organization, 2023).

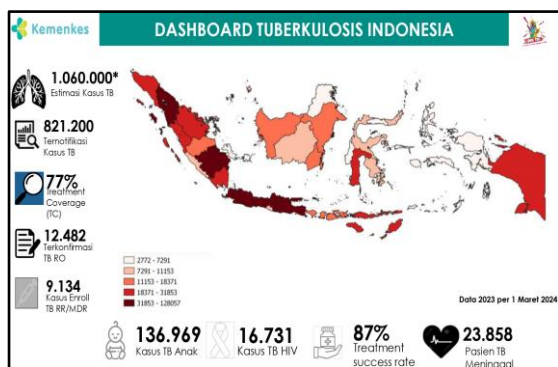
Kelembaban yang tinggi dalam ruangan dapat mempercepat proliferasi mikroorganisme penyebab penyakit dan menurunkan kualitas udara yang dihirup oleh penghuni rumah. Sementara itu, ventilasi yang tidak memadai menghambat sirkulasi udara segar, sehingga memperbesar kemungkinan seseorang menghirup droplet yang mengandung bakteri TBC terutama di lingkungan yang padat dan tertutup. Keberadaan partikel debu dan polutan lainnya, seperti hasil pembakaran sampah atau asap kendaraan, juga berpotensi merusak sistem pernapasan, menurunkan imunitas paru-paru, dan memperparah kondisi penderita TBC.

Penyakit tuberkulosis (TBC) tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit menular yang sangat berbahaya apabila tidak ditangani secara serius. Lebih dari itu, TBC juga memiliki dampak sosial yang signifikan, seperti stigma, diskriminasi, dan hilangnya produktivitas individu yang terinfeksi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan komitmen bersama dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, fasilitas layanan kesehatan, masyarakat, hingga keluarga pasien, untuk memastikan bahwa penanggulangan TBC dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Menurut data dari Sistem Informasi Tuberkulosis per 1 Maret 2024, tercatat sebanyak 821.200 kasus tuberkulosis (TBC), yang telah tercapai sekitar 77% dari target nasional.

Gambar 1.

Data Pasien Terdeteksi Kasus Tuberkulosis di Indonesia 2024 (per 1 Maret)



Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2024

Jumlah kasus tuberkulosis (TBC) yang cukup tinggi di Indonesia menunjukkan betapa mendesaknya perlunya langkah-langkah yang lebih agresif dan terintegrasi dalam menangani penyakit ini. Upaya tersebut harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang komprehensif, peningkatan fasilitas layanan kesehatan, hingga penguatan sistem pengawasan dan

diagnosis dini. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan pencegahan dan pemberantasan TBC dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Provinsi Banten menargetkan sekitar 50.391 kasus tuberkulosis (TBC) untuk tahun ini. Namun, sampai saat ini, laporan kasus tuberkulosis yang tercatat baru mencapai sekitar setengah dari angka target tersebut. Oleh karena itu, masih terdapat sekitar 25.196 kasus TBC yang belum terdeteksi dan perlu diidentifikasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya yang lebih gencar dan terfokus.

Tabel 1.

Jumlah Kasus Ternoifikasi TBC di Kabupaten / Kota Provinsi Banten Tahun 2023-2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	2023	2024 (1 Januari - 30 November)
1.	Kabupaten Tangerang	6.540	11.551
2.	Kota Tangerang	10.955	11.517
3.	Kota Tangerang Selatan	4.198	5.017
4.	Kabupaten Serang	2.365	4.673
5.	Kabupaten Lebak	4.458	4.559
6.	Kabupaten Pandeglang	2.407	3.532
7.	Kota Serang	1.084	3.206
8.	Kota Cilegon	1.336	1.589

Sumber: Sistem Informasi Tuberkulosis, 2024

Data jumlah kasus TBC yang tercatat di Kabupaten Lebak selama tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan adanya sedikit kenaikan dari 4.458 kasus di tahun 2023 menjadi 4.559 kasus hingga 30 November 2024. Meskipun kenaikan ini tidak sebesar yang terjadi di Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang, peningkatan jumlah kasus di Kabupaten Lebak tetap menjadi perhatian utama.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya implementasi eliminasi TBC di daerah

tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Peningkatan jumlah kasus ini tidak hanya sekadar angka statistik, melainkan mencerminkan adanya hambatan struktural, sosial, maupun sistemik yang harus diidentifikasi dan ditangani secara efektif.

Tabel 2.

Jumlah Temuan Kasus Ternoifikasi Tuberkulosis di Wilayah Tertinggi se-Kecamatan di Kabupaten Lebak

No.	Kecamatan	2023	2024
1.	Cibeber	237	178
2.	Malingping	153	176
3.	Rangkasbitung	164	162

Sumber: SITB, Dinas Kesehatan Kab. Lebak, 2024

Dari ketiga wilayah dengan temuan kasus ternoifikasi Tuberkulosis di Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2023, yakni sebanyak 237 kasus. Meskipun angka ini mengalami penurunan menjadi 178 kasus di tahun 2024, jumlah kasus yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa Kecamatan Cibeber menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan TBC.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Kecamatan Cibeber jauh lebih kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit ini. Faktor-faktor seperti sanitasi yang kurang memadai, kepadatan penduduk, serta minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan menjadi hambatan utama dalam pengendalian TBC di wilayah ini. Oleh karena itu, Kecamatan

Cibeber harus menjadi prioritas utama dalam strategi dan eliminasi TBC, dengan pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, pemerintah melalui kebijakan seperti Peraturan Gubernur Banten No. 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis menunjukkan komitmen yang tegas dan serius dalam memberantas TBC. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam memperkuat sinergi antara berbagai pihak, memperluas akses layanan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan langkah-langkah strategis dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga tantangan yang ada dapat diatasi dan target eliminasi TBC dapat dicapai secara lebih optimal di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lebak telah berupaya mengadopsi strategi penanganan tuberkulosis (TBC) secara menyeluruh. Upaya ini diwujudkan melalui jaminan bahwa pasien TBC memperoleh akses terhadap pengobatan yang konsisten dan tuntas. Strategi tersebut turut melibatkan pemantauan dari tenaga kesehatan serta dukungan dari keluarga pasien guna memastikan kepatuhan terhadap protokol pengobatan, sekaligus mencegah munculnya resistensi obat yang dapat memperburuk kondisi pasien.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Eliminasi TBC di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Permasalahan pertama berkaitan dengan kurang optimalnya edukasi masyarakat mengenai pengetahuan dasar, bahaya, pencegahan, serta upaya perubahan

perilaku terhadap penyakit TBC. Hal ini terlihat jelas pada beberapa desa seperti Citorek Barat, Citorek Kidul, Citorek Tengah, Neglasari, dan Warungbanten, yang masih mencatatkan angka kasus TBC cukup tinggi. Kurangnya penyuluhan kesehatan secara masif dan berkelanjutan menjadi penyebab utama lemahnya pemahaman masyarakat, meskipun Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 telah menegaskan pentingnya promosi kesehatan dalam mendukung penanggulangan TBC. Implementasi regulasi ini masih bersifat bertahap dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, sehingga berakibat pada rendahnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan dini dan mencegah penularan.

Masalah kedua yang ditemukan adalah tingginya stigma sosial terhadap penderita TBC, khususnya di wilayah seperti Desa Citorek Tengah. Pandangan negatif masyarakat yang menganggap TBC sebagai penyakit akibat ilmu hitam atau kiriman menyebabkan penderita merasa dikucilkan dan enggan menjalani pengobatan medis. Sikap diskriminatif ini sangat bertolak belakang dengan amanat Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 yang menekankan peran serta masyarakat dalam menghapus stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC. Stigma sosial ini menjadi penghambat signifikan terhadap upaya menciptakan lingkungan yang sehat yang terbebas dari penyakit menular seperti TBC.

Ketiga, ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Cibeber turut menjadi hambatan dalam upaya eliminasi TBC. Sebagian besar masyarakat masih mempercayai hal-hal mistis dalam menyikapi penyakit, sehingga lebih memilih pengobatan tradisional daripada layanan medis. Selain itu, tingkat

kemiskinan yang cukup tinggi mengakibatkan terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan, baik dari sisi biaya transportasi maupun pembiayaan pengobatan. Masalah ekonomi ini diperburuk oleh kondisi permukiman warga yang masih banyak tergolong tidak layak huni. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2024, terdapat 1.723 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Cibeber. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan mendukung penyebaran bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, pelaksanaan Eliminasi TBC di Kecamatan Cibeber masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, baik dari sisi edukasi, sosial budaya, maupun ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal dan memerlukan strategi yang lebih efektif dan berbasis pada penguatan lingkungan sehat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi program Eliminasi TBC dilaksanakan di Kecamatan Cibeber serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi kebijakan Eliminasi TBC dan mengidentifikasi hambatan maupun upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari TBC di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Ada beberapa definisi mengenai istilah kebijakan publik. Salah satunya menurut Thomas R. Dye dalam

(Wicaksono, 2006:63), menyatakan bahwa *“kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.”*

Meskipun definisi yang diberikan oleh Dye dianggap cukup akurat, namun masih kurang lengkap dalam menggambarkan esensi atau inti dari kebijakan publik yang sesungguhnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa pengertian kebijakan publik yang lebih rinci dan spesifik menurut berbagai ahli, seperti yang akan dijelaskan berikut:

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) dalam (Nugroho, 2009:83), mendefinisikan *“kebijakan publik sebagai sebuah program yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu yang telah ditetapkan (a projected program of goals, values, and practices).”*

James Anderson (1984) dalam (Agustino, 2008:7) memberikan pandangan dengan mendefinisikan kebijakan publik dalam bukunya *Public Policy Making* sebagai *“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”*

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pilihan tindakan yang berada di bawah kewenangan aktor-aktor pemerintah, yang dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat krusial dalam rangkaian proses kebijakan publik, karena keberhasilan pemerintah dalam

menyelesaikan permasalahan masyarakat sangat bergantung pada keberhasilan tahap ini. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh para pembuat kebijakan tidak selalu menjamin hasil yang diharapkan, mengingat kompleksitas dalam pelaksanaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu maupun organisasi. Selain itu, proses implementasi kebijakan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, di mana berbagai pihak dapat melakukan intervensi yang mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Agustino, 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”*

Kemudian Grindle menyampaikan arti implementasi kebijakan, yang dikutip dalam (Wahab, 2012:126), menyatakan bahwa *“Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.”*

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi

kebijakan publik adalah proses pelaksanaan dari suatu kegiatan yang sebelumnya telah disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pemerintahan. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan capaian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan bersama.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Model pendekatan top-down yang dikembangkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn dikenal sebagai Model Implementasi Kebijakan. Proses ini merupakan gambaran atau abstraksi dari pelaksanaan kebijakan yang dirancang secara sengaja dengan tujuan mencapai kinerja optimal dalam implementasi kebijakan publik, yang melibatkan interaksi berbagai variabel. Model ini berasumsi bahwa pelaksanaan kebijakan berlangsung secara linier, dimulai dari keputusan politik yang ada, kemudian dilanjutkan oleh para pelaksana, dan akhirnya menghasilkan kinerja publik.

Menurut Van Metter dan Van Horn (dikutip dalam Subarsono, 2011: 99), terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan publik, yaitu: (1) Sasaran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap atau Kecenderungan Pelaksana, (5) Komunikasi antar Organisasi, dan (6) Lingkungan Eksternal seperti aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Pengertian Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan melalui pengobatan teratur dan pengawasan dalam mengonsumsi obat (PMO). Penyakit ini bukanlah keturunan atau kutukan, dan umumnya menyerang paru-paru, meskipun juga bisa mempengaruhi organ tubuh lainnya (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2021: 67). Penularan tuberkulosis terjadi melalui udara (penyakit airborne), melalui partikel kecil yang disebut droplet nuclei dengan ukuran antara 1 hingga 5 mikron, yang dapat bertahan di udara selama beberapa jam tergantung kondisi lingkungan.

Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang memiliki kemampuan untuk menyerang tidak hanya paru-paru, tetapi juga berbagai organ tubuh lainnya. Organ-organ yang dapat terkena dampak infeksi ini meliputi ginjal, kelenjar getah bening, rahim, usus, tulang, bahkan otak. Hal ini menunjukkan bahwa tuberkulosis tidak hanya berbahaya karena sifatnya yang menular, tetapi juga karena kemampuannya untuk menyebar ke berbagai bagian tubuh, yang dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat.

Penularan penyakit ini sangatlah mudah terjadi melalui cairan dari saluran pernapasan yang dikeluarkan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Partikel kecil yang mengandung bakteri, yang dikenal sebagai droplet nuclei, dapat tersebar di udara dan dihirup oleh orang di sekitarnya. Jika

inhalasi terjadi dalam jumlah yang cukup besar dan sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawannya, kemungkinan besar orang tersebut akan tertular penyakit ini.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua individu yang menghirup udara yang tercemar bakteri akan langsung tertular tuberkulosis. Keberhasilan penularan sangat bergantung pada kondisi kekebalan tubuh masing-masing orang. Mereka yang memiliki sistem imun yang kuat cenderung lebih mampu melawan infeksi dan tidak menunjukkan gejala penyakit, sementara mereka yang memiliki sistem imun yang lemah, seperti penderita HIV/AIDS, orang dengan gangguan imun, atau mereka yang sedang menjalani pengobatan tertentu, berisiko lebih tinggi untuk tertular dan berkembang menjadi sakit.

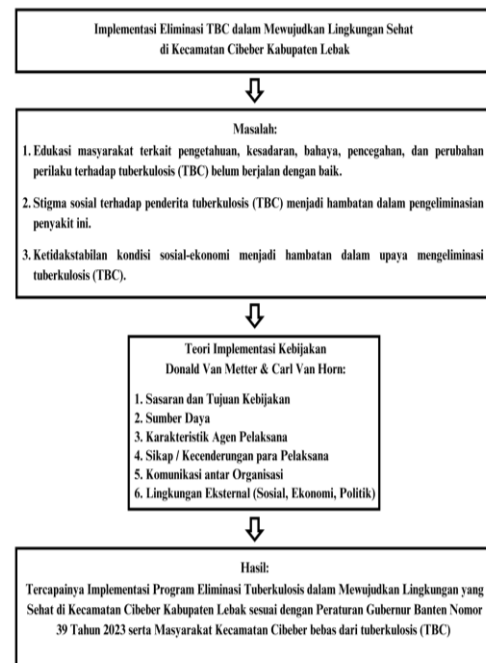
Selain faktor kekebalan tubuh, kondisi lingkungan juga mempengaruhi tingkat penularan. Tempat yang kurang ventilasi dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi memudahkan penyebaran bakteri, karena udara yang mengandung droplet nuclei tidak cepat terbawa pergi dan tetap berada di sekitar individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan seperti menjaga kebersihan, meningkatkan ventilasi ruang, dan vaksinasi adalah langkah penting untuk mengurangi risiko penularan tuberkulosis.

Dengan memahami mekanisme penularan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan infeksi, masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pengobatan yang tepat dan lengkap juga sangat diperlukan bagi

penderita yang telah terinfeksi, agar tidak menularkan ke orang lain dan mencegah perkembangan komplikasi yang lebih serius.

Kerangka Konseptual

Gambar 2.
Kerangka Konseptual Implementasi Eliminasi TBC di Kec. Cibeber Kab. Lebak



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan Eliminasi TBC di Kecamatan Cibeber. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis fakta empiris, kendala, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, fokus penelitian tertuju pada pemahaman terhadap proses, makna, dan interaksi sosial dari perspektif para pelaku yang terlibat, baik petugas

kesehatan, aparat desa, maupun masyarakat.

Seperti didefinisikan oleh Creswell (2016), studi kasus merupakan strategi penelitian yang melibatkan eksplorasi mendalam terhadap suatu sistem atau kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Pemilihan Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, sebagai lokasi kasus didasarkan pada observasi awal yang menunjukkan bahwa wilayah ini menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaan program eliminasi TBC, sekaligus mencatat angka kasus tertinggi.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dengan informan kunci (petugas kesehatan, aparat desa, dan masyarakat), observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan dan data epidemiologis. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014) yang meliputi tiga tahapan kegiatan yang saling berkaitan: (1) Reduksi Data, yaitu proses seleksi, pemusatan, dan penyederhanaan data; (2) Penyajian Data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk naratif dan matriks untuk mempermudah penarikan kesimpulan; dan (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Dalam menjamin keabsahan data, penelitian ini mengutamakan aspek kredibilitas. Teknik yang digunakan untuk mencapai kredibilitas adalah triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber (informan) dan berbagai metode pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi). Selain itu, pertimbangan etika (*ethical considerations*) diterapkan secara ketat dalam seluruh proses penelitian untuk melindungi hak dan kerahasiaan partisipan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang berjudul Implementasi Eliminasi TBC dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn sebagai kerangka analisis. Dalam perspektif teori ini, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh enam komponen utama, yaitu: (1) Sasaran dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap atau Kecenderungan Pelaksana, (5) Komunikasi antar Organisasi, dan (6) Lingkungan Eksternal seperti aspek ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, akan dipaparkan sejumlah data dan temuan lapangan yang berhasil dihimpun oleh peneliti sebagai dasar dalam menganalisis implementasi kebijakan tersebut, yang diperkaya dengan wawasan dari literatur terkini.

Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung pada kejelasan ukuran dan tujuan yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di tingkat pelaksana. Dalam konteks ini, Puskesmas Kecamatan Cibeber menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan Eliminasi Tuberkulosis (TBC).

Berdasarkan hasil wawancara, arah dan target kebijakan Eliminasi TBC mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan TBC. Ukuran keberhasilan kebijakan ini dinilai melalui indikator-indikator seperti jumlah kasus yang berhasil ditemukan, tingkat keberhasilan pengobatan, kepatuhan

pasien terhadap pengobatan, serta penurunan angka penularan TBC. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mahendradhata et al. (2017) yang menekankan bahwa kejelasan indikator kinerja merupakan pondasi utama untuk memantau kemajuan program eliminasi TBC.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, masih kuatnya stigma terhadap penderita TBC, kesalahpahaman mengenai penyebab penyakit ini, serta keterbatasan sumber daya dan akses terhadap layanan kesehatan. Studi dari Kementerian Kesehatan RI (2020) mengonfirmasi bahwa tantangan serupa masih banyak ditemui di berbagai daerah dengan beban TBC tinggi di Indonesia, menunjukkan bahwa ini adalah masalah sistemik.

Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, penting bagi sasaran dan tujuan kebijakan untuk disusun secara realistis, dapat diterima oleh masyarakat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup. Sayangnya, di Kecamatan Cibeber, target yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut sangat krusial untuk menilai kesesuaian sasaran dan tujuan dengan kesiapan daerah serta relevansinya terhadap tantangan masyarakat, guna memastikan terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman TBC.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang memadai. Dalam upaya

mewujudkan lingkungan yang sehat dalam melaksanakan Eliminasi TBC di Kecamatan Cibeber, keberadaan sumber daya manusia sebagai pelaksana utama kebijakan menjadi elemen kunci. Selain itu, dukungan dalam bentuk anggaran, sarana, dan prasarana juga memainkan peran penting.

Berdasarkan temuan penelitian, sumber daya manusia yang tersedia masih jauh dari ideal. Agen pelaksana kebijakan, yakni tim dari Puskesmas, menyampaikan bahwa jumlah tenaga yang ada tidak sebanding dengan beban kerja serta jumlah kasus TBC di wilayah tersebut. Keterbatasan ini sesuai dengan laporan (World Health Organization, 2022) yang menyoroti kekurangan tenaga kesehatan sebagai salah satu hambatan terbesar dalam penanggulangan TBC global, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Dampaknya adalah rendahnya jangkauan dan intensitas pelaksanaan kebijakan, yang bersifat berbasis masyarakat dan membutuhkan keterlibatan aktif warga. Minimnya tenaga pelaksana menghambat penyuluhan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, serta upaya preventif lainnya.

Dari sisi anggaran, meskipun dana operasional telah dialokasikan melalui APBD dan Global Fund, penggunaannya masih belum sepenuhnya maksimal. Kurangnya efektivitas dalam pemanfaatan anggaran menunjukkan adanya potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung langkah-langkah strategis dalam menekan angka penularan TBC.

Sementara itu, pada aspek sarana dan prasarana, kendala juga ditemukan dalam hal ketersediaan alat diagnostik seperti TCM (Tes Cepat Molekuler). Tidak semua Puskesmas memiliki fasilitas ini,

sehingga proses pemeriksaan memerlukan pengiriman sampel ke lokasi lain yang lebih lengkap. Prosedur ini berisiko memperlambat deteksi dini dan pengobatan, yang pada akhirnya berdampak pada upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Temuan ini diperkuat oleh studi Pande et al. (2022) yang menunjukkan bahwa akses yang tidak merata terhadap diagnostik molekuler modern merupakan bottleneck signifikan dalam kaskade perawatan TBC di banyak negara berpenghasilan rendah-menengah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam pelaksanaan Eliminasi TBC di Kecamatan Cibeber masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun efektivitas pemanfaatannya. Untuk benar-benar mewujudkan lingkungan yang sehat, diperlukan penguatan di semua lini sumber daya.

Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara pelaksana kebijakan dan kebijakan yang dijalankan, serta sejauh mana cakupan pelibatan para pelaksana. Dalam konteks upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dalam melaksanakan Eliminasi TBC di Kecamatan Cibeber, karakteristik agen pelaksana menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, khususnya dalam hal peran dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan hasil penelitian, peran para pelaksana kebijakan, terutama dari pihak Puskesmas dan pemangku kepentingan lainnya, secara umum sudah berjalan cukup baik. Namun, tantangan besar terletak pada rendahnya keterlibatan

masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Padahal, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai bagian dari lingkungan terdekat pasien TBC, serta sebagai pelaksana langsung berbagai aktivitas preventif dan promotif. Minimnya partisipasi masyarakat ini menjadi hambatan serius dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari penularan TBC. Partisipasi masyarakat yang rendah ini merupakan tantangan umum, sebagaimana diidentifikasi dalam (World Health Organization, 2023) yang menyatakan bahwa tanpa keterlibatan yang bermakna dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, program TBC berisiko tidak mencapai mereka yang paling membutuhkan, maka Pentingnya keterlibatan masyarakat dan masyarakat sipil dalam mengakhiri TB merupakan ujung tombak dalam pengentasan TBC.

Di sisi lain, pelaksanaan SOP dalam kebijakan ini telah berjalan dengan baik. Para agen pelaksana menyatakan bahwa seluruh tahapan dalam Eliminasi TBC telah dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap SOP ini mencerminkan kesiapan teknis dan administratif dari para pelaksana dalam menanggulangi TBC secara terstruktur dan terstandar.

Dengan demikian, meskipun dari segi prosedural telah terlaksana sesuai standar, keterlibatan masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan utama. Untuk benar-benar menciptakan lingkungan yang sehat, diperlukan upaya yang lebih besar dalam membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra aktif. Kolaborasi yang lebih erat antara pelaksana kebijakan dan komunitas lokal menjadi kunci dalam menjadikan Eliminasi TBC tidak hanya

sebagai agenda institusional, tetapi juga sebagai gerakan bersama.

Sikap atau Kecenderungan Pelaksana

Dalam pelaksanaan kebijakan Eliminasi TBC di Kecamatan Cibeber, pelaksana kebijakan mencakup dua pihak utama, yaitu Puskesmas sebagai lembaga teknis pelaksana, serta masyarakat sebagai sasaran sekaligus mitra penting. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung dan menerima kebijakan sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi.

Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa tingkat penerimaan dan keterlibatan masyarakat Kecamatan Cibeber terhadap kebijakan Eliminasi TBC masih tergolong rendah. Sebagian besar warga menunjukkan sikap pasif, dan hanya segelintir yang peduli, itu pun lebih karena alasan pribadi daripada kesadaran terhadap pentingnya program kesehatan masyarakat. Masih banyak warga yang memiliki pemahaman terbatas dan memegang pandangan konservatif terhadap penyakit TBC, sehingga tidak memandangnya sebagai ancaman serius terhadap kesehatan lingkungan. Rendahnya literasi kesehatan dan keberadaan stigma ini didukung oleh temuan (Ashaba et al., 2023) yang menjelaskan bahwa stigma terhadap TBC secara signifikan mengurangi pencarian pengobatan dan kepatuhan, menciptakan lingkungan di mana TBC dapat terus menyebar.

Sementara itu, dari sisi institusional, pihak Puskesmas telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan. Namun, rendahnya dukungan masyarakat tetap menjadi

hambatan yang signifikan dalam mencapai target eliminasi TBC secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek sikap pelaksana, terutama dari kalangan masyarakat, masih terdapat kelemahan serius yang berdampak pada keberhasilan kebijakan. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari TBC, diperlukan peningkatan literasi kesehatan, kampanye penyadaran yang lebih masif, serta pendekatan partisipatif yang mendorong masyarakat agar lebih peduli dan aktif. Lingkungan yang sehat tidak hanya dibentuk oleh intervensi medis, tetapi juga oleh kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen masyarakat.

Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi yang efektif, terutama dalam bentuk koordinasi dan aktivitas antar pelaksana kebijakan, memainkan peran vital dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Semakin terbangun komunikasi yang intens dan koordinasi yang baik, maka semakin besar pula peluang tercapainya tujuan kebijakan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan Eliminasi TBC di Kecamatan Cibeber berlangsung secara sistematis dan intensif. Hal ini tampak dari lancarnya interaksi antara pelaksana kebijakan, seperti Puskesmas dan tenaga kesehatan, dengan masyarakat serta pasien TBC. Para pelaksana aktif menyampaikan informasi, edukasi, dan panduan pengobatan, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya TBC dan pentingnya pengobatan yang tuntas.

Selain komunikasi dengan masyarakat, koordinasi yang solid juga terbentuk antara berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan, kader kesehatan, dan mitra organisasi seperti Yayasan Penabulu. Kolaborasi ini mencakup pelaporan kasus, sistem rujukan, hingga pemantauan pengobatan secara rutin. Sinergi yang terjalin antar sektor ini menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan yang terarah dan efisien. Pentingnya kolaborasi multi-sektor semacam ini ditekankan dalam laporan Stop TB Partnership (2021), yang menyatakan bahwa kemitraan yang kuat antara pemerintah, LSM, dan komunitas adalah kunci untuk mempercepat kemajuan menuju eliminasi TBC.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam variabel komunikasi antar pelaksana kebijakan, Kebijakan Eliminasi TBC di Kecamatan Cibeber telah menunjukkan pelaksanaan yang optimal. Komunikasi yang terbuka dan koordinasi lintas sektor yang kuat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat, di mana penyakit seperti TBC dapat dikendalikan secara sistemik melalui kerja sama yang harmonis.

Lingkungan Eksternal (Sosial, Ekonomi, dan Politik)

Faktor lingkungan eksternal yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik di wilayah sasaran kebijakan berperan besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, ketiga aspek ini harus berjalan selaras agar implementasi kebijakan kesehatan, kebijakan Eliminasi TBC, dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kecamatan Cibeber, penelitian menunjukkan bahwa situasi

ekonomi dan sosial masyarakat masih belum stabil dan cenderung kurang mendukung pencapaian tujuan kebijakan kesehatan. Banyak warga yang mengalami keterbatasan finansial, sehingga mengakses layanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, norma sosial yang berlaku juga belum sepenuhnya mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Munculnya stigma terhadap penderita TBC dan rendahnya kesadaran akan bahaya penyakit ini menyebabkan masyarakat masih mengabaikan risiko penularan. Hambatan sosio-ekonomi ini merupakan determinan sosial kesehatan yang kritis, sebagaimana digarisbawahi (World Health Organization, 2022) dalam konteks kerangka kerja TBC global WHO, yang menyerukan pendekatan yang berpusat pada orang dan peka terhadap konteks sosial.

Namun demikian, dari sisi politik, situasi di Kecamatan Cibeber tergolong stabil. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan serta pihak pelaksana seperti Puskesmas menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Eliminasi TBC. Dukungan politik dan kepemimpinan yang kuat ini diakui secara global sebagai pemacu utama dalam respon terhadap TBC.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam variabel lingkungan eksternal, Kecamatan Cibeber menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun dukungan politik cukup kokoh, tantangan ekonomi dan sosial yang mendalam masih menjadi hambatan signifikan bagi upaya mewujudkan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara intervensi kebijakan, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, serta edukasi sosial yang berkelanjutan dan sensitif terhadap stigma agar program kesehatan dapat berjalan optimal dan berdampak positif bagi kualitas hidup masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan kebijakan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kecamatan Cibeber sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terciptanya lingkungan yang sehat. Permasalahan utama terletak pada sasaran dan tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta sikap pasif masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengendalian TBC.

Meskipun koordinasi dan komunikasi antar pelaksana, seperti Puskesmas dan instansi terkait, telah berjalan cukup baik, tantangan besar tetap muncul dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang belum stabil. Stigma negatif terhadap penderita TBC dan kesalahpahaman tentang penyakit ini menyebabkan masyarakat enggan untuk terbuka dan terlibat aktif, yang pada akhirnya menghambat proses penanganan penyakit serta memperburuk kondisi lingkungan kesehatan secara keseluruhan.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya upaya edukasi masyarakat mengenai bahaya TBC, pencegahan, serta pentingnya perubahan perilaku menuju hidup bersih dan sehat. Ketidakstabilan sosial-ekonomi juga berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, untuk benar-benar mewujudkan lingkungan yang sehat di Kecamatan Cibeber, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan intensif. Ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pengurangan stigma, penguatan sistem layanan kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, Eliminasi TBC dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.

Daftar Pustaka

- A.G. Subarsono. 2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Cet. 2 ed.)*. Alfabeta.
- Ashaba, C., Musoke, D., Wafula, S. T., & Lule, J. K.-. (2023). Stigma among tuberculosis patients and associated factors in urban slum populations in Uganda. *African Health Science*, 4, 1640-1650. 10.4314/ahs.v21i4.18
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024*. Kementerian Kesehatan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. D., & J., S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3 ed.)*. Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

(PDPI). (2021). Tuberkulosis Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia (Edisi Revisi 2 ed.). Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Stop TB Partnership. (2022, Desember). Global Plan to End TB: 2018-2022. Stop TB Partnership. Retrieved October 12, 2024, from https://stoptb.org/assets/documents/global/plan/GPR_2018-2022_Digital.pdf

Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.

Wicaksono, K. W. (2006). Administrasi dan birokrasi pemerintah. Graha Ilmu.

World Health Organization. (2022). *Framework for Collaborative Action on Tuberculosis and Comorbidities*. World Health Organization.

_____ (2023). Global Tuberculosis Report 2023. World Health Organization.

_____ (2023). *Guidance on Engagement of Communities and Civil Society to End Tuberculosis*. World Health Organization.